

## JABATAN DAN KELAS JABATAN - KEMENSOS

2023

PERMENSOS NO.3 BN 2023/ NO.569, 7 HLM

### PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan tata kelola dalam menentukan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Sosial. bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf telah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB melalui surat nomor B/714/M.SM.02.00/2023 tanggal 15 Juli 2023. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti
  - Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 110 Tahun 2021; Perpres Nomor 50 Tahun 2022; Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2013; Permensos Nomor 10 Tahun 2021; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permensos 2 Tahun 2022; Permensos 3 Tahun 2022 dan Permensos 6 Tahun 2022.
  - Permensos ini mengatur tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 17 hlm